

FORUM FREEDOM

Bersama Saiful Mujani (SM) dan Hamid Basyaib (HB).

Tema: partai oposisi dan demokrasi.

HB: Halo, selamat pagi saudara. Anda kembali bersama saya Hamid Basyaib dalam Forum Freedom. Dan tamu saya pagi ini adalah Dr. Saiful Mujani. Selamat pagi bung Saiful.

SM: Selamat pagi bung hamid.

HB: Nah, ini temanya adalah yang dia sangat cocok yaitu oposisi dan demokrasi. Dan saya akan memberi pengantar sedikit, yaitu soal Rakernas Partai Demorasi Indonesia Perjuangan, yang berlangsung 7 sampai 9 Januari yang lalu di sanur, dan menegaskan kembali posisinya sebagai partai oposisi. Dan keputusan ini bukan yang pertama, karena itu ditegaskan saja, sebelumnya dia sudah menegaskan dan kita tahu bahwa deklarasi tentang oposisionalnya sebuah partai ini gejala yang terhitung baru ya, ini juga gejala reformasi, karena sebelumnya di masa Presiden Suharto, dan sebelumnya di masa Presiden Sukarno itu dilarang dan jadi haram. Nah dalam kaitan ini menarik bung Saiful, karena dia menegaskan, Partai Demokrasi pimpinan Megawati ini menegaskan kembali oposisinya, setelah saya kira mereka tahu hasil survey anda, Lembaga Survei Indonesia yang diumumkan 28 Desember yang lalu oleh anda sendiri yang bilang bahwa popularitas Presiden SBY itu justru naik dibanding sebelumnya. Sekarang popularitasnya menurut anda 67 persen bahkan kemungkinan dia dipilih lagi naik juga besar. Kalau tahun 2005 orang yang ingin memilih lagi itu 40 persen, dan sekarang menjadi 56 persen. Nah, bung Saiful, sebelum kita ngomong lebih lanjut tentang fenomena ini, saa mau nanya hal yang paling dasar, sebetulnya apa sih peran partai oposisi dalam konteks dunia politik secara umum?

SM: Secara umum peran oposisi itu dikaitkan terutama dengan parlemen atau dengan DPR di kita di mana di DPR tersebut, atau wakil-wakil kita di DPR tersebut merupakan kelanjutan dari kekuatan partai politik dan di sanalah sebenarnya, di DPR itulah mekanisme check and balances harus terjadi di dalam demokrasi. Jadi oposisi merupakan syarat yang sangat penting di dalam demokrasi untuk membuat mekanisme check and balances itu berjalan di dalam sebuah demokrasi. Maka apa yang dikemukakan PDI Perjuangan berulang-ulang menurut saya itu suatu keniscayaan dan yang lebih penting sebetulnya, bukan menekankan bahwa PDI Perjuangan sebagai oposisi, tapi harus lebih maju dari itu secara substansial, apa yang dioposisi-i itu ya, oleh PDI Perjuangan tersebut terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi di sini, bukan hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai oposisi, tetapi juga harus punya kebijakan-kebijakan alternative yang bisa meyakinkan public bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang itu buruk, dan yang lebih baik menurut PDI Perjuangan katakanlah begitu adalah versi PDI Perjuangan itu sendiri.

HB: di semua bidang lah ya?

SM: Di semua bidang, tentu saja. Karena ini terkait dengan ketua PDI Perjuangan sendiri, Ibu Megawati yang pernah berkuasa jadi Presiden, jadi platformnya itu adalah platform pembangunan nasional. Sebut lah begitu, oleh karena itu harus mencakup banyak dimensi. Apakah itu ekonomi, apakah itu kesejahteraan social, apakah itu yang berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu oposisi harus diwujudkan dalam bentuk alternatif-alternatif kebijakan yang diyakini atau setidaknya dirasakan oleh oposisi itu lebih baik. Saya melihat sekarang ini, oposisi kita apakah itu PDI Perjuangan atau yang lain, yang mencoba bersikap oposisi, itu tidak cukup mampu untuk menawarkan program-program alternative yang lebih baik dari yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Nah oleh karena itu menurut saya sampai hari ini, sentiment public terhadap oposisi yang berimplikasi pada politik tersebut itu tidak muncul, karena substansinya saya nggak melihat begitu kuat pada PDI Perjuangan.

HB: yang anda mau katakan, anu ya, mungkin ada semacam, kalau di luar negeri, di barat ya yang tradisi demokrasinya sudah mapan, biasanya partai oposisi otomatis membuat semacam kabinet bayangan ya.

SM: persis.

HB: jadi di semua bidang, dia bisa kritik, di transportasi, di pertanian, ada juga menteri-menteri bayangan.

SM: persis.

HB: nah sekarang di PDI hanya menegaskan saja bahwa dirinya oposisi dan nggak bikin cabinet semacam itu.

SM: itu pertama, bahwa kabinet itu, kabinet bayangan tersebut merupakan konsekuensi saja dari upaya untuk menjabarkan gagasan-gagasan oposisional. Kalau gagasan-gagasan itu tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan muncul dengan apa yang disebut kabinet bayangan tersebut.

HB: anda sangat meragukan bahwa gagasannya itu sendiri memang tidak ada?

SM: sejauh ini menurut saya, kalau punya kenapa nggak dikemukakan begitu Megawati kalah di 2004 dalam pemilu. Harusnya begitu kalah dia menyatakan sebagai oposisi, dan program saya berbeda dengan SBY dengan soal ini satu, dua, tiga. Nah kita nggak menemukan dan mendengar sampai hari ini.

HB: apalagi dia sudah berpengalaman jadi presiden ya, mestinya cabinet bayangan seperti itu segera dapat dibentuknya ya. Kabinet beneran saja dia bisa bikin ya.hahaha...

SM: untuk hal itu, isu-isu yang spesifik misalnya, apa, impor beras misalnya, atau kenaikan harga BBM, hal-hal semacam itu pada zaman Ibu Megawati juga terjadi. Jadi menurut saya tidak aada hal yang baru. Itu soal ada pada posisi yang berbeda saja. Dan kalau PDI Perjuangan sekarang berkuasa kembali, saya kira kebijakannya tidak banyak berbeda ya.

HB: Nah, ini menarik sekali, kalau oposisi kan dulu diidentikkan dengan perlawanan terhadap otoritarianisme ya, sekarang orde baru sudah berlalu, dan runtuh, lalu fungsi oposisi apa lagi?

SM: Oposisi kalau dulu memang pertama-tama bisa kita sebut sebagai underground, gitu ya, di bawah tanah oposisi itu ya, karena tidak bisa terbuka.

HB: makanya kalau disebut biasanya disebutkan-oposisi loyal...

SM: Oposisi loyal atau apapun namanya, yang jelas pada waktu itu, nilai oposisi itu sangat luar biasa, dan seorang yang disebut oposisi itu artinya pahlawan. Sekarang udah terjadi semacam inflasi, kata oposisi itu. Sering, terlalu sering diucapkan, dan terlalu sering ditunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang yang bersikap oposisi terhadap pemerintah tapi substansi dari oposisi itu apa? Nah itu yang nggak kelihatan. Oleh karena itu menurut saya sekarang memang bedanya pada zaman otoritarian, Suharto katakan begitu, oposisi sekarang bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk memberikan kritik terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan. Kalau untuk menjatuhkan pemerintah, ada mekanismenya. Tunggu lima tahun. Jadi oposisi, dengan mengkritiki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut diharapkan terakumulasi dan berujung pada waktu pemilihan umum nanti misalnya pada 2009. bukan untuk menjatuhkan pemerintah yang ada sekarang.

HB: di tengah jalan.

SM: tapi di zaman otoritarian, karena nggak ada mekanisme yang jelas, gitu ya, bisa saja di tengah jalan seorang pemimpin dijatuhkan.

HB: Nah ini begini, ini menarik sekali karena PDI P ini sudah tegas-tegas mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi, dan toh anda sangat meragukannya dengan alasan yang tepat tadi, yang anda katakan. Lalu, bisa nggak dikatakan, bahwa di Indonesia ini sebenarnya sama sekali tidak ada kelompok oposisi, kalau PDI-ny saja yang paling berpeluang untuk oposisional ternyata kosong gitu ya, lalu bener-bener nggak ada?

SM: Oposisi secara substansif gitu ya, atau keberadaan oposisi itu sendiri, kita bisa sebut lemah, katakan begitu sekarang. Pertama-tama dari segi substantive, kita tidak melihat dari kekuatan oposisi itu. Itu satu. Kedua, secara politik juga lemah, lemah dalam artian bahwa tidak ada kekuatan signifikan di DPR untuk membendung gitu ya, kebijakan-kebijakan atau perilaku-perilaku politik dari eksekutif gitu ya, sehingga walaupun ada keinginan untuk misalnya interpelasi, untuk menyelidiki pemerintah, untuk menggunakan hak bertanya kepada pemerintah, itu nyaris selalu gagal karena nggak ada kekuatan politik yang berarti di parlemen. Itu satu sisi. Itu bisa akibat lemahnya kekuatan partai politik di parlemen untuk melakukan check and balances, dan menggunakan hak-hak tadi di DPR kepada presiden, bisa jadi karena-adalah kekuatan oposisi, kursi sebagai oposisi yang menghadapi presiden itu sedikit, gitu ya seperti sekarang yang kita lihat, dan bisa juga karena tidak jelasnya apa yang mau dioposisikan itu. Sehingga tidak mampu meyakinkan partai-partai politik yang lain yang diajak untuk menghadapi presiden. Jadi

bisa dua itu, yang satu karena lasan partisan, ya pokoknya kamu ngomong apapun nggak akan saya dengar, pokoknya saya pendukung presiden. Itu partisan. Alasan yang kedua lebih substantive, jadi bisa saja orang berubah sikapnya, misalnia kan bagaimanapun di parlemen itu hubungan antara presiden dengan partai politik itu kan cukup longgar. Misalnya PAN, bisa berubah anytime gitu. Tergantung isu. Demikian juga PKS, gitu ya, demiekian juga PKB, demikian juga PPP, sebetulnya kalau kita punya argument yang kuat dan bisa meyakinkan kekuatan-kekuatan yang “liar” ini, gitu ya, mengambang ini, maka sesungguhnya kekuatan oposisi yang tadinya lemah bisa menjadi kuat kalau secara substantive bisa meyakinkan kekuatan-kekuatan tersebut. Nah saya tidak melihat itu pada PDI Perjuangan, kemampuan untuk meyakinkan itu.

HB: artinya sebetulnya potentiality, sebagai potensi ada ya. Nah anda bilang bahwa mereka itu nggak tahu apa yang dioposisikan. Menurut anda aneh, saya dengarnya aneh ini, artinya bahwa, bisa nggak anda nyebut misalnya sebetulnya ada isu-isu tertentu yang bisa diolah menjadi bahan mesiu yang baik bagi gerakan oposisi gitu. Apa saja itu kira-kira?

SM: menurut saya begini, yang bisa diolah adalah terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya kebijakan ekonomi dalam hal ini BBM, misalnya ya. Kenaikan harga BBM tentu saja itu bisa caranya itu bukan menolak kenaikan harga BBM, kalau itu sebetulnya kembali pada kasus PDI Perjuangan, PDI Perjuangan-Ibu Mega waktu itu juga menaikkannya. Jadi itu tidak bisa di pakai yang kayak gitu. PDI Perjuangan tidak bisa tidak harus lebih maju dari pemerintah dalam hal ini. Harunya meng-oposisiani, bersikap oposisi terhadap pemerintah dengan cara yaitu mengapa begitu lambat mengambil keputusan menaikkan harga BBM? Misalnya.

HB: artina justru, dia harus dinaikkan lebih cepat? Hahaha.

SM: lebih cepat, lebih tinggi misalnya. Terus, misalnya penjualan BUMN. Pada zaman Ibu Megawati itu kan penjualannya besar-besaran itu terjadi oleh Laksamana Sukardi. Nah kenapa platform itu tidak diteruskan dan dipertajam oleh PDI Perjuangan, untuk menghantam pemerintah yang ada sekarang. itu kalkulasi ekonomik dan teknokratiknya lebih kuat ketimbang untuk menolaknya gitu. Jadi di sini harus ada suit yang sangat besar, yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan, tidak hanya reaksioner seperti itu. Reaksioner itu misalnya kenaikan harga BBM itu kita tolak. Itu reaksioner.

HB: impor beras tolak.

SM: tapi kalau dia berkuasa, melakukannya gitu. Harunya adalah lebih maju ke depan, kenapa ini impor beras kok lambat sekali, begitu.

HB: harus segera diimpor.

SM: konsumen begitu besar gitu ya, dirugikan karena kenaikan harga beras dalam negeri, misalnya. Tidak ada jalan lain, kita harus menyelamatkan orang yang paling banyak, yaitu dengan impor, kan begitu. Nah harusnya lebih maju ke depan. Nah, PDI Perjuangan, ada hambatan-hambatan ideologis di satu sisi, dia ingin populistik, di satu

sisi populistik dalam pengertian saya yang salah, karena mayoritas masyarakat itu konsumen bukan produsen padi atau beras gitu ya. Oleh karena itu mayoritas yang dibela, bagaimana caranya menekan harga beras itu lebih murah. Dan salah satu mekanismenya adalah melakukan impor.

HB: wah ini menarik sekali, kita lanjutkan setelah yang satu ini, anda masih bersama Forum Freedom, saya Hamid Basyaib dan kita akan istirahat sejenak.

Bagian II

HB: selamat pagi lagi saudara, anda masih bersama Forum Freedom. Saya Hamid Basyaib dan tamu saya masih yang tadi Dr. Saiful Mujani. Dan tadi dia ngomong bahwa tidak otentik dan tidak kredibelnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau mendeklarasikan sebagai partai oposisi, bahwa dengan alasan bahwa beberapa hal yang dikritiknya sebetulnya dilakukan juga oleh PDIP. PDIP ketika Ibu Megawati berkuasa. Jadi Saiful malah mengusulkan supaya tindakannya kalau oposisinya mau benar dan mau otentik, harus mau lebih maju lagi dari pada pemerintah. Misalna dalam kasus impor beras, yang harus dikritik oleh partai seperti PDIP sebagai oposisi semestinya kenapa impornya begini lama, mestinya lebih cepet. Dan mungkin naik BBM sebagainya dan harganya harus lebih tinggi lagi dari pada yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini betul-betul adalah ide yang menantang dan mudah-mudahan orang PDIP bisa mendengar saran-saran anda ini Bung Saiful. Tapi kita masih bergerak dalam konteks lebih jauh yaitu dalam masalah oposisi, nah dalam konteks kepemimpinan presiden SBY dan Jusuf Kalla sekarang ini menurut anda, tadi anda kritik betapa tidak adanya sebetulnya partai-partai oposisi, yang memang substansinya memang nggak ada ya. Nah sekarang menurut anda bagaimana sebetulnya oposisi dalam konteks yang sekarang, apakah seperti yang dilakukan oleh bung Hariman Siregar dan kawan-kawan yang hari ini mau bergerak dengan slogan cabut mandat! Memperingati 15 Januari 1974.

SM: tetap saja menurut saya oposisi dalam konteks demokrasi yang sedang kita bangun ini adalah oposisi dalam tingkat kebijakan dan control bagaimana misalnya pelaksanaan pemerintahan, gitu ya. Kan banyak yang bisa dikritisi, bukan hanya pada kebijakan yang saya kemukakan tadi, misalnya tentang bagaimana susahnyanya orang investasi di Indonesia. Partai oposisi harus punya alternative untuk mempercepat proses investasi. Bagaimana begitu banyak meja yang harus dilalui, begitu banyak harus bayar, begitu lama harus menyelesaikan suatu ijin nvestasi di suatu daerah. Nah menurut saya partai seperti PDIP Perjuangan harus punya alternative seperti itu. Oleh karena itu oposisi menurut saya syaratnya di dalamnya harus ada kekuatan teknokratik. Kekuatan teknokratik dalam pengertian bahwa ada unsure-unsur dalam PDI Perjuangan yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan-kebijakan alternative, dan itu tidak bisa sepenuhnya dikerjakan

oleh seorang politisi. Itu betul-betul diback up oleh kekuatan para ahli di belakang partai tersebut. Menyampaikan kebijakan alternative dan disampaikan oleh elit-elit partai tersebut. Nah itu caranya. Banyak sekali kebijakan yang oleh pemerintah sekarang belum mampu disentuh, misalnya bagaimana pemberantasan korupsi harus dilakukan, misalnya. Penegakan hukum, konflik social dan seterusnya. Bagaimana misalnya soal penguatan Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya, jadi banyak sekali yang bisa dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan alternatif terhadap pemerintah. Nah itu bisa membuat masyarakat lebih simpatik kemudian. Hal-hal yang menjadi komitmen seperti PDI Perjuangan jelas, dalam soal kebangsaan dia sangat kuat.

HB: tidak diragukan lagi ya.

SM: tidak diragukan lagi, dalam soal itu.

HB: tapi dalam investasi kalau anda singgung itu ada masalah ya.

SM: Kemungkinan ada masalah. Tapi tidak bisa tidak, itu harus apa namanya, PDI Perjuangan kalau mau lebih pro aktif ke depan untuk Indonesia, dia harus mengambil langkah-langkah yang lebih maju dari pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. minimal dalam tingkat ide dan dalam tingkat proposal kebijakan itu kan lebih mudah timbang menjalankannya kan.

HB: Resikonya sebetulnya hampir nggak ada sebetulnya.

SM: Ya. Tidak apa-apa. Nah selama ini saya tidak melihat itu, kecuali kalau pemerintah melangkah satu itu ya, dia bereaksi, jangan begitu.

HB: langkahnya setengah dia, bukannya dua.

SM: nah itu, oposisi tetap harus di sana bung Hamid ya, untuk memperkuat demokrasi kita. Bukan seperti yang anda sebut tadi, gitu ya. Oposisi dengan berkeinginan untuk menurunkan pemerintah sekarang juga. Itu menurut saya, bukan suatu bentuk oposisi, suatu revolusi yang diinginkan sebenarnya karena ingin menurunkan pemimpin nasional, yang sah, yang dipilih oleh rakyat, begitu ya, yang diatur oleh konstitusi, ada mekanismenya bahwa orang bisa diturunkan setelah menjabat sekian lama, dan prosedur menurunkannya juga ada. Tidak dengan jalan paksa atau dengan membuat kerusuhan atau apa pun namanya. Nah di banyak kasus negara-negara demokrasi bila kekuatan seperti ini, kekuatan ingin mengganti, ingin mencabut mandat istilah mereka, dari presiden yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu tersebut, dilakukan anytime, kapan saja dia mau, itu akan membuat demokrasi tidak akan stabil, dan akan membuat demokrasi sangat lemah, dan cenderung gagal, gitu ya. Nah oleh karena itu, saya sama sekali tidak mengapresiasi gagasan untuk menurunkan presiden, bukan saya mendukung presiden sekarang, tapi itu menyalahi konstitusi kita. Dan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, bukan demokrasi jalanan, seperti itu. Oleh karena itu saya tidak melihat itu sebagai alternative yang sehat untuk penguatan demokrasi kita. Kalau dilakukan penurunan, bersikap oposisi dengan menurunkan pemerintah yang sah sekarang, di luar prosedur pemilihan umum yang sudah menjadi komitmen kita.

HB: nah ini bung Saiful, ini menarik juga ya, bahwa ada kesan bahwa kelompok-kelompok semacam itu hanya menggunakan istilah oposisi, tapi kesannya mereka asal saja dalam beroposisi gitu. Atau motifnya mungkin sakit hati ya kalau kita lihat misalnya wacana yang dikembangkan ya, misalnya baru-baru ini Pak Try Sutrisno, Pak Hariman Siregar, ada Pak Moeslim Abdurrahman, minta kepada DPR, supaya DPR mencabut mandat Presiden, itu kan merupakan suatu hal yang aneh dan menggelikan, karena nggak pernah DPR memberi mandat kepada presiden kan. Bahkan di masa lalu di masa orde baru pun itu ada di MPR. Nah kelihatan bahwa kelompok-kelompok semacam ini kelihatannya agak mustahil kalau dibilang nggak ngerti aturan-aturan main yang begitu elementer. Bagaimana anda melihat fenomena ini?

SM: saya melihat bahwa, apakah itu ketidaksabaran politik atau apa pun namanya saya tidak tahu, tapi yang jelas itu, sejauh itu tidak punya pengaruh, punya implikasi yang luas, tidak apa-apa. Bagian dari kembangan-kembangan demokrasi. Tapi bahwa salah satu unsur yang sangat penting dalam pematangan demokrasi dalam sebuah negara di mana pun di dunia adalah apabila tidak ada kekuatan signifikan di dalam masyarakat yang berperilaku di luar prosedur yang sudah disepakati dalam proses pergantian kekuasaan. Kalau itu tidak ada, maka demokrasi itu terkonsolidasi. Kalau ada, sangat kecil dan tidak signifikan, nah usulan yang diberikan oleh Pak Hariman Siregar dan teman-temannya itu kita lihat, apakah mendapat sambutan atau tidak. Kalau tidak, berarti demokrasi kita memang sudah sangat matang gitu. Kita udah mulai matang dan terkonsolidasi. Masyarakat pada umumnya tidak membeli ide-ide semacam itu. Tapi kalau itu mendapat sambutan, maka kita memang masih sangat rentan gitu ya. Rentan dalam artian perkembangan demokrasi kita ke depan. Karena indikatornya adalah, sebuah demokrasi tidak terkonsolidasi apabila kekuatan yang signifikan di dalam masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan kepemimpinan, di luar prosedur yang sudah disepakati yaitu yang tertulis dalam konstitusi kita. Nah oleh karena itu, saya berharap ini bukan fenomena atau bukan gejala dari memburuknya demokrasi kita dengan perilaku-perilaku semacam itu.

HB: tapi kalau kita lihat, belum ada gejala-gejala bahwa ide ini akan dibeli ya, atau bagaimana kalau kita kaitkan dengan hasil riset anda bahwa popularitas presiden SBY itu sudah demikian tinggi melampaui perolehan suaranya ya, dia dapat 62 persen sekarang. anda bilang 67 persen popularitasnya.

SM: Ya. Itu indikasi juga, sejauh mana masyarakat sebenarnya menerima atau menolak pemerintah yang berkuasa sekarang. jadi legitimasi presiden sekarang kita ikuti dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun.

HB: cenderung naik?

SM: legitimasi itu dalam pemilu, kita dapatkan, mendapat 60 persen sekian, presiden SBY. Kemudian setelah setahun, kita ukur tidak banyak berubah, sekarang terakhir bulan desember kemarin 67 persen. Itu artinya apa? Ada approval, kesepakatan dari

masyarakat terhadap bagaimana pemerintahan dijalankan oleh SBY. Itu artinya adalah suatu basis legitimasi yang sangat kuat dari pemerintahan yang ada sekarang. nah oleh karena itu kita juga melihat sejauh mana kemungkinan alternative, pemimpin-pemimpin alternative yang bisa menyaingi SBY misalnya kalau diadakan pemilu sekarang. kita melihat tidak ada satu pun yang mendapatkan suara mendekati suara SBY kalau diadakan pemilu sekarang. itu artinya apa? Belum ada kekuatan oposisi atau calon pemimpin alternative yang kredibel di mata masyarakat untuk sementara ini. Artinya apa? Ya seperti Ibu Megawati, atau seperti Pak Wiranto, mau maju kembali, itu adalah indikasi-indikasi bahwa kekuatan oposisi melemah dalam artian tidak ada tokoh baru, tidak ada alternative baru, yang bisa kemungkinan memberikan kontribusi yang lebih baik untuk menghadapi presiden SBY. Kenapa yang maju harus Pak Wiranto lagi. Kenapa yang maju harus Ibu Megawati lagi, misalnya. Apalagi pak Try Sutrisno turun misalnya seperti itu. Jadi menurut saya, gerakan-gerakan yang mungkin anda sebut tadi orang sakit hati atau apa, mungkin juga. Karena apa? Seperti Pak Frans Seda misalnya, kok kayak kita ini yang muda tenang-tenang saja melihat itu. Tapi kok yang tua-tua menjadi sangat repot dengan itu. Nah itu mengindikasikan bahwa di dalam kubu oposisi tersebut tidak terjadi suatu regenerasi, tidak ada satu upaya peningkatan kekuatan secara sistematis, kenapa? Kalau posisi itu ingin kuat maka dia harus punya pengaruh pada generasi-generasi yang lebih muda dan saya melihat, pada generasi yang lebih muda tidak terlalu signifikan. Justru yang vocal adalah orang-orang yang tua.

HB: Gerontokasi(?). tapi menarik sekali ya. Ini berarti semua wacana yang dikembangkan, yang kritis, yang substansi kritiknya sebetulnya cukup mengecewakan ya, bukan berarti kita mendukung presiden SBY tapi kalau kita menyaksikan pertarungan ide yang bermutu kan menarik sekali. Ini yang tidak terjadi.

SM: Ya. Kita ingin gagasan-gagasan, dan mungkin pada prosedur-prosedur, dan sebagainya, dalam mengurus politik kita ini yang lebih baru gitu dari yang sekarang, bukan hanya sekedar misalnya kita tidak setuju dengan amandemen misalnya, itu kan isu-isu yang terlalu lama...

HB: betul-betul mundur ya.

SM: dan betul-betul itu melawan hati nurani masyarakat.

HB: nah ini menarik, melawan hati nurani masyarakat. Mereka jelas sekali bepretensi mengatasnamakan masyarakat ya. Masyarakat capek, masyarakat sudah lelah, presidennya nggak tegas dan sebagainya untuk sebagian memang betul, presiden nggak tegas, tapi lagi-lagi survey anda membuktikan popularitas SBY dengan segala ketidaktegasannya yang dikritik oleh orang-orang elit itu, ternyata disukai oleh 67 persen.

SM: Persis, persis.

HB: ini soalnya.

SM: bukan hanya itu. Kita juga harus cari sebabnya. Sebabnya apa. Kok SBY masih begitu kuat, populer, karena soalnya, tidak ada alternative, bukan masyarakat tidak tahu,

masyarakat juga tahu ingin yang lebih baik, pemerintah ingin lebih tegas, pembangunan ingin lebih cepat, gitu ya, birokrasi ingin lebih efisien, penegakan hukum ingin lebih baik, tapi semua itu, siapa yang melakukan itu diantara tokoh-tokoh nasional ini. Kalau yang muncul orang itu, maaf saja. Pada zaman orde baru, mereka sudah banyak perannya di sana, dan kita sudah tahu gitu loh, mestinya orang seperti pak Tri Sutrisno, maaf saja, mereka kontribusinya sudah, mestinya kalau punya alternatif-alternatif ketika dulu berkuasa menurut saya. Sekarang kita melihat bahwa tidak ada relevansinya gerakan-gerakan itu dengan perkembangan politik kita, yang sudah lebih maju dibandingkan pada zamannya waktu itu. Jadi maaf saja, generasi kita yang lebih muda saya kira akan menertawakan saja terhadap gerakan-gerakan semacam itu.

HB: Bung Saiful, permintaan maaf anda diterima, dan yang anda anggap menertawakan itu saya kira juga ada benarnya. Dan dengan itu kita akhiri Forum Freedom kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Dan saudara begitulah akhir dari Forum Freedom kita, saya Hamid Basyaib mundur diri dan sebelumnya anda bisa mengirim sms ke 021 70497497, sekali lagi 021 70497497 saya tunggu sms anda untuk komentarnya, kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalam.